

BAB II

PERGESERAN KURIKULUM, PERKEMBANGAN SOSIOLOGI DAN KURIKULUM SOSIOLOGI SMA: DALAM PERGULATAN KEKUASAAN INDONESIA

2.1 Pengantar

Bab ini akan menjelaskan tiga bagian penting sebagai penajaman studi yang dilakukan. *Pertama*, menjelaskan pergulatan kekuasaan dalam kurikulum sepanjang kurikulum menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Satu hal yang tak dapat dipisahkan adalah perjalanan kurikulum di Indonesia tidak steril dari kekuasaan. Kekuasaan selalu menyebar dalam berbagai bentuk dalam pelaksanaan kurikulum. Adagium politik pendidikan sebagai bagian dari *nation and character building* disadari sejak awal kemerdekaan Indonesia, bahkan jauh sebelumnya, sebagaimana yang telah dirintis oleh Perguruan Taman Siswa.¹ *Kedua*, dalam menjelaskan kekuasaan tersebut Sosiologi sebagai satu disiplin ilmu tak bisa dipisahkan sebagai ruang yang tidak steril dari kepentingan dan kekuasaan. *Ketiga*, di bagian akhir menjelaskan bagaimana dinamika kurikulum sosiologi SMA dalam konteks kekuasaan pendidikan Indonesia.

Dengan demikian menjelaskan relasi sosiologi dengan kekuasaan sejatinya tidak bisa dipisahkan dari konteks ilmu sosial Indonesia. Signifikansinya membahas bagian ini. *Pertama*, penting untuk menempatkan sosiologi sebagai satu *social field* yang menggambarkan adanya pertarungan simbolik (*symbolic struggles*) baik secara individual maupun kolektif. *Kedua*, keberadaan hubungan antara ilmu sosial dan kekuasaan dan juga secara lebih umum antara pengetahuan dan kekuasaan.² Hal ini dilakukan sebagai *entry point* dalam mengkaji fokus utama studi ini, kontestasi kekuasaan dalam kurikulum Sosiologi SMA. Tarik menarik kekuasaan dalam ilmu sosial di Indonesia tentu saja menyuguhkan berbagai praktek-praktek ekonomi politik yang mengitarinya. Berbagai *discourse* hadir, dipertahankan dan mengalami reproduksi. Pada konteks itulah, bagian

¹ Tilaar, HAR (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta:Rineka Cipta, hal. 29

² Lihat Hadiz dan Dhakidae (2006). Hadiz, R. Vedi (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto* (Terjemahan). Jakarta:LP3ES, hal.3. Lihat juga Dhakidae (2003) hal 318

ini menemukan signifikansinya sebagai bagian penting dalam meneropong berbagai *discourse* yang muncul. Dengan demikian, meski berada pada ranah sekolah, tetapi kurikulum Sosiologi SMA bukan gejala yang netral maupun alami.

2.2 Kurikulum dalam Ranah Kekuasaan Indonesia

2.2.1 Kurikulum Pra Kolonial

Sejarah kurikulum di Indonesia meski tak ada data pasti, tetapi dapat dilacak keberadaannya pada masa pra kolonial. Perjalanan panjang perkembangan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Buddha pada abad ke-5 masehi.³ Saat itu proses pendidikan telah berlangsung dalam kondisi yang sangat sederhana. Proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kedua ajaran agama tersebut. Saat itu, meski tidak tersedia dalam sebuah rencana namun bahan pengajaran dimiliki oleh para pendeta maupun biksu. Lihat misalnya, pada saat Kerajaan Sriwijaya mengalami kemasyuran dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Hal yang sama dialami pada zaman Majapahit (abad 14-16). Saat itu pendidikan tak diselenggarakan secara massal seperti zaman Sriwijaya. Akan tetapi diberikan secara terbatas oleh beberapa guru dan kelompok murid dalam satu padepokan. Pada masa itu pendidikan telah diberikan dari tingkat dasar, lanjutan hingga tinggi. Meski tidak dilakukan secara formal, tetapi para guru yang mengajar memiliki rencana pengajaran yang berkisar pada berbagai pengetahuan yang bersifat umum dan juga khusus untuk menopang kehidupan kesehariannya.

2.2.2 Kurikulum Zaman Kolonial

Kurikulum pada zaman kolonial ketika VOC mengendalikan Indonesia disusun sedemikian rupa dan sudah relatif sangat canggih. Abad 17, pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan sistem pendidikan yang ditujukan untuk mendidik tenaga-tenaga terampil yang dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka. Waktu itu beberapa jenis pendidikan yang tersedia meliputi pendidikan dasar, sekolah latin (*latijnsche school*), pendidikan teologi (*seminar theologicum*), akademi pelayaran (*academie der*

³Kusumo, *Pendidikan Sebelum Masa Kolonial* dalam Salim (2004). *Indonesia Belajarlah; Membangun Pendidikan Indonesia*. Semarang: Gerbang Madani, hal 219-220

Marine).⁴ Pada akhir 1818, pada masa Daendels dikeluarkan peraturan umum mengenai persekolahan dan sekolah rendah. Isinya hanya mengenai ketentuan-ketentuan tentang pengawasan, pengajaran, namun tidak menyinggung perluasan pengajaran bagi golongan pribumi.

Sistem pendidikan saat itu menekankan kurikulum yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan mengisi lowongan kerja dalam administrasi modern, dengan gaji dan hasil yang lebih baik. Saat itu kurikulum pengajaran yang diwajibkan pemerintah kolonial adalah pengetahuan umum (Bahasa Belanda, sastra, dan berhitung). Materi pelajaran yang tertuang dalam kurikulum terutama dikonsentrasikan kepada menulis, membaca, dan menghitung. Kurun waktu ini berkembanglah apa yang dikenal *indologie*, persisnya sejak 1842. *Indologie* dipahami sebagai suatu bagian dari ilmu oriental yang dikembangkan untuk tujuan menyiapkan bekal pengetahuan tentang masyarakat negeri jajahan bagi calon administratur yang akan bertugas di Hindia-Belanda.⁵

Dalam pandangan Kayam, pola pendidikan yang dikembangkan Hindia-Belanda tersebut hanya berorientasi kepada kebutuhan praktis dari suatu pemerintah jajahan. Kurikulum yang ada saat itu hanya ditekankan kepada pendidikan calon-calon juru tulis (*klerk*), pegawai rendah dan pegawai menengah birokrasi kolonial, termasuk lulusan STOVIA dipersiapkan untuk menjadi mantri cacar.⁶ Pengembangan kurikulum pengajaran nasional pada masa pergerakan diimplementasikan ke dalam berbagai sistem pengajaran baik umum maupun kejuruan. saat itu didirikan berbagai sekolah kejuruan seperti Sekolah Guru (*Kweekschool*)⁷ di Surakarta pada tahun 1852. Menyusul, sekolah pertanian, teknik, sekolah kehutanan, dan sebagainya. Puncaknya, pada dua dasawarsa pertama abad ke-20 didirikan sekolah tinggi pertama di Bandung yaitu *Technische Hoge School* (THS) pada 1922 yang kemudian dikenal dengan ITB. Saat itu, kurikulum yang digunakan semuanya mengacu ke kurikulum yang dikembangkan Belanda. Diantaranya diterapkan sistem persamaan (*konkondantie*), seorang siswa dapat meneruskan

⁴ Suryana, *Pendidikan Masa Kolonial* dalam Salim (2004). *Indonesia Belajarlah: Membangun Pendidikan Indonesia*. Semarang: Gerbang Madani, hal. 226.

⁵ Zed, Mestika, *Ilmu Sosial Indonesia dalam Wacana Methodenstrein* dalam Abdullah, Taufiq (ed), 2006. *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal.57

⁶ Lihat Kayam, Umar (1989), *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, (19 Mei 1989), hal.19.

⁷ Kelak sekolah ini menjadi cikal bakal Sekolah Pendidikan Guru (SPG)

pelajarannya sampai ke Belanda. Saat itu, banyak dilakukan pengiriman mahasiswa program pascasarjana ke Belanda untuk berbagai bidang studi.⁸

2.2. 3 Kurikulum 1947

Setelah Indonesia merdeka, melalui BP-KNIP merekomendasikan untuk melakukan perubahan mendasar kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ide ini direalisasikan dengan pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran, salah satu diantara tugasnya adalah menyusun sistem persekolahan pada tahun 1947. Ini merupakan kurikulum pertama yang diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia pada awal kemerdekaan. Kurikulum ini mengacu kepada keluarnya Undang-Undang No. 4 tahun 1950 yang merumuskan pula tujuan kurikulum menurut jenjang pendidikan. Saat itu menteri pendidikannya adalah Mr. Soewandi. Sayangnya, karena masih dalam revolusi fisik maka rencana pelajaran 1947 itu belum dapat dilaksanakan dan baru dapat dilaksanakan lagi pada 1952, yang tertuang dalam UU No. 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran. Disinilah kemudian melahirkan Kurikulum 1950 yang kemudian digantikan dengan Kurikulum 1958.

2.2. 4 Kurikulum 1958

Fase berikutnya, kurikulum pendidikan nasional menyesuaikan diri dengan Keputusan MPRS No. II/MPRS/1960 yang merumuskan mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai suatu bagian dari pada sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta berencana yaitu tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semua kurikulum pengajaran harus menginduk kepada keputusan itu yang dituangkan melalui Keputusan Presiden RI No. 145/Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional antara lain dirumuskan mengenai pembinaan manusia Indonesia sebagai berikut⁹:

1. Manusia Indonesia baru yang berjiwa Pancasila Manipol/Usdek dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut.

⁸ Salim, *Pendidikan Zaman Pergerakan* dalam Salim (2004), *Indonesia Belajarlah; Membangun Pendidikan Indonesia*. Semarang: Gerbang Madani. hal. 240.

⁹ Tilaar, loc.cit, hal. 252. Lihat juga Assegaf, Abdul Rachman (2005). *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal. 79

2. *Manpower* yang cukup untuk melaksanakan pembangunan.
3. Kepribadian kebudayaan nasional yang luhur
4. Ilmu dan teknologi yang tinggi.
5. Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan revolusi.

Singkatnya, saat itu pendidikan menjadi alat revolusi dalam upaya menciptakan warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila. Kurikulum ini lazim disebut Rencana Pelajaran 1960. Jiwa dan visi kurikulum ini adalah gotong royong dan demokrasi terpimpin.¹⁰ Waktu itu kaitan yang sangat erat antara pendidikan dan politik dirumuskan bahwa pendidikan sebagai alat revolusi dalam suasana berdikari mengharuskan pembantingan stir dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan. Dengan kebijakan di atas maka tujuan pendidikan nasional dari pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi untuk melahirkan warga Negara sosialis Indonesia yang bersusila, bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual dan yang berjiwa Pancasila.

2.2. 5 Kurikulum 1968

Kurikulum mengalami dinamika baru ketika Orde Lama tumbang dan Orde Baru mengambil alih kekuasaan negara. Melalui Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan dirumuskan mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isinya. Beberapa muatan kurikulum yang ditekankan diantaranya:

1. Mempertinggi mental-moral-budi pekerti
2. Memperkuat keyakinan beragama
3. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
4. Membina/memperkembangkan fisik-jasmani yang kuat dan sehat.

¹⁰ Abdullah, Anzar (2007). *Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah: Suatu Tinjauan Kritis Filosofis* dalam *Jurnal Dikbud* No. 066 Tahun ke-13 Mei 2007, hal. 340-361. Jakarta: Balitbang Depdiknas RI

Dirumuskannya tujuan pendidikan tersebut menandakan adanya pergeseran orientasi pendidikan dari membentuk manusia sosialis atas pengaruh Manipol menjadi manusia Pancasila sejati, sebagai upaya pemurnian semangat Pancasila yang sesuai dengan kehidupan Orde Baru. Dalam perjalanannya, kurikulum ini dikenal dengan Kurikulum 1968 melalui kepemimpinan Mashuri SH sebagai Menteri Pendidikan (1968-1973). Kurikulum ini juga disebut dengan *correlated subject curriculum*.¹¹ Pada kurikulum ini penjurusan di SMA dilakukan di kelas II dan disederhanakan menjadi dua jurusan yaitu Jurusan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam (Paspal) dan Jurusan Sastra Sosial Budaya. Selain itu, salah satu semangat yang dikembangkan diantaranya membangun *nation building* dalam setiap proses pendidikannya. Itu dapat dilihat dengan dilarang masuknya sekolah asing di seluruh Indonesia. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum sekolah terakhir yang disusun sebelum Repelita I¹².

2.2. 6 Kurikulum 1975

Orde Baru semakin mengokohkan kekuasaannya melalui pendidikan. Tahun 1975, kurikulum kembali diperbaharui. Diantaranya melalui dibentuknya Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan dan Pengajaran (BP 4) yang dipimpin oleh H.S Adam Bachtiar.¹³ Usaha lainnya dilakukan dengan Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM). Kurikulum pada periode ini cenderung diarahkan pada pembangunan dan kemajuan (*development and progress oriented*) sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja yang memiliki watak, pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang.

Maka pada 1973 lahirlah GBHN yang pertama sebagai Keputusan MPR No. II/MPR/1973 yang melahirkan Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dikembangkan pada saat bangsa Indonesia berjuang untuk memantapkan pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara substansi, kurikulum ini mulai memiliki sistematis dan tujuan pendidikan yang jelas. Diantara kurikulum-kurikulum

¹¹ Diatya Widya (2006). *Politisasi Identitas Keindonesiaan dalam Dunia Pendidikan Era Reformasi (Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat SMA, Menurut KBK 2004)*, Skripsi Departemen Sosiologi FISIP UI (tidak dipublikasikan), Depok, hal. 30

¹² Wirasti (2002). *Wacana Ideologi Negara dalam Pendidikan; Analisis Wacana Kritis terhadap Buku-Buku Teks Pendidikan untuk SD dan SLTP antara Tahun 1975-2001*. Tesis Departemen Komunikasi FISIP UI, Depok (tidak dipublikasikan), hal.63

¹³ Tilaar loc.cit, hal 257

sebelumnya, Kurikulum 1975 boleh dikata lebih *sophisticated*. Dari tujuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan berbagai rincian lainnya sehingga jelas apa yang akan dicapai melalui kurikulum tersebut. Penjurusan di SMA dimulai kelas I, pada permulaan Semester II. Penjurusan dibagi atas tiga, yaitu Jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Kurikulum ini diberlakukan pada saat Syarif Tayeb menjabat Menteri Pendidikan Kebudayaan (1973-1978). Kurikulum 1975 juga dikenal sebagai *integrated curriculum organization*.¹⁴

2.2. 7 Kurikulum 1984

Pada saat Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan Nasional, kurikulum terjadi perubahan yaitu masuknya unsur kebudayaan dalam pendidikan nasional. Saat itu, muncul konsep mengenai pendidikan humaniora dan kebudayaan yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan unsur-unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh, sehingga terdapat keseimbangan antara pendidikan intelektual dengan pendidikan moral serta estetika. Kepemimpinan Daoed Joesoef dikenal dengan Kurikulum 1984 yang menggantikan Kurikulum 1975. Kurikulum 1984 disusun setelah pemerintahan Orde Baru berjalan dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa. Banyak kebijakan yang dikeluarkan demi memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada masa ini kebijakan pembangunan nasional mempunyai ciri-ciri¹⁵ :

1. Semesta, artinya meliputi semua unsur kebudayaan, yaitu logika, etika, estetika, keterampilan, nilai-nilai moral dan spiritual.
2. Menyeluruh, artinya pendidikan untuk seumur hidup, meliputi pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah
3. Terpadu, artinya baik pendidikan sekolah atau luar sekolah juga madrasah merupakan suatu keterpaduan di dalam sistem pendidikan nasional.

Salah satu produk dari kurikulum ini adalah metode belajar Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan mulai diajarkannya mata pelajaran Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) untuk semua jenjang. Diajarkannya PSPB merupakan bagian terpadu

¹⁴ Widya, op.cit

¹⁵ Tilaar, loc.cit, hal. 259

dari program pendidikan nasional dalam upaya menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Tujuan diajarkannya PSPB adalah untuk menanamkan dan mensosialisasikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 yaitu nilai-nilai yang telah memungkinkan keberhasilan para pendahulu dalam menegakkan, mempertahankan, membela dan mengisi kemerdekaan. Berdasarkan kurikulum ini terlihat juga penjurusan di SMA dibagi atas lima jurusan yaitu: Program A1 (Ilmu Fisika), Program A2 (Ilmu Biologi), Program A3 (Ilmu Sosial), Program A4 (Ilmu Bahasa dan Budaya), Program A5 (Ilmu Agama).

2.2. 8 Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 terus direvisi. Hasilnya, Kurikulum 1994 menjadi acuan saat itu. Kurikulum ini terkait dengan lahirnya UU Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka terhitung Tahun Pelajaran 1994/1995, kurikulum ini resmi diterapkan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1994, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ing Wardiman Djojonegoro (1993-1998) menetapkan kurikulum yang dikenal *objective based curriculum*. Kurikulum 1994 secara jelas merupakan alat negara untuk menderivasi rumusan GBHN yang menjelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami Pembangunan Jangka Panjang II atau dianggap sebagai masa Kebangkitan Nasional ke-2. Semangatnya, hendak diorientasikan kepada pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK.

Dalam kurikulum 1994 terdapat beberapa kebijakan penting penting yang mencuat seiring dengan dikeluarkannya kurikulum 1994¹⁶. *Pertama*, berdasarkan serangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Depdikbud tahun 1986 merekomendasikan perlunya perintisan kurikulum nasional yang menjamin tersedianya peluang untuk diisi dengan muatan lokal. *Kedua*, pada saat itu kebijakan pola pendidikan dasar 9 tahun mulai dikembangkan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. *Ketiga*, Rakernas 1990 merekomendasikan perlunya pembenahan materi pelajaran P4, PMP dan PSPB. Hasilnya, pelajaran PSPB dihapus. Mata pelajaran PMP berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penjurusan di SMA dibagi atas tiga jurusan

¹⁶ Abdullah (2007). loc.cit, hal. 347

yaitu jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Pada kurikulum ini mulai diperkenalkan Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK.

2.2. 9 Kurikulum 2004 (KBK)

Setelah itu berubah lagi pada masa Abdul Malik Fajar menjabat Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004). Sejak awal 2001 disusun Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk menggantikan Kurikulum 1994. Semangat KBK terinspirasi dari UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Saat itu ada tiga kebijakan penting yang termuat dalam KBK yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Ujian Akhir Nasional (UAN).¹⁷

2.2. 10 Kurikulum 2006 (KTSP)

Terakhir kepemimpinan Bambang Sudibyo mengesahkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 22/2006 tentang Standar Isi Pendidikan (dan No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan/SKL) menginisiasi kurikulum tingkat satuan pendidikan alias KTSP di Indonesia. Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007, KTSP atau akrab disebut Kurikulum 2006 diterapkan di Indonesia. Kurikulum 2006 memberi keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memerhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar. Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah diberikan peluang untuk mengembangkan dan menetapkan KTSP.¹⁸ Secara lebih lengkap disajikan dalam tabel dibawah ini :

¹⁷ Depdikbud (1994). *Kurikulum 1994: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Isi Kurikulum dan Pengelolaan Kurikulum, Pengelolaan Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdikbud. hal.1

¹⁸ St Kartono, *KTSP Menuju Kurikulum "Less Is More"* dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0611/21/jogja/1030938.htm>-Selasa, 21 November 2006

Tabel 2.1
Kurikulum dalam Konteks Kekuasaan Indonesia

No	Kurikulum	Orientasi & Setting Sosial
1.	Rencana Pelajaran 1947	Ini merupakan kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia, yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan bangsa Indonesia setelah merdeka.
2.	Rencana Pelajaran 1960	Kurikulum yang dilaksanakan merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional (mulai dari pra sekolah hingga perguruan tinggi) untuk melahirkan apa yang disebut warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya. Intinya, moral pendidikan nasional adalah Pancasila Manipol/Usdek.
3.	Kurikulum 1968	Kurikulum ini oleh sebagian pengamat dan praktisi pendidikan dikenal sangat teoritis dan berpola <i>correlated subject curriculum</i> , yaitu mata pelajaran yang satu dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lain walaupun batas demarkasi antarmata pelajaran masih terlihat dengan jelas.
4.	Kurikulum 1975	Kurikulum yang mulai diterapkan pada Tahun Pelajaran 1976/1977 ini mendekatkan mata pelajaran dengan problem sekitar dan pengorganisasian materi bidang studi dilaksanakan secara integral (<i>integrated curriculum organization</i>). Beberapa mata pelajaran dari rumpun yang sama diorganisasikan secara integral menjadi suatu bidang studi dengan harapan masalah lingkungan dapat didekati secara interdisipliner. Salah satu ciri khas kurikulum ini adalah muatan Pendidikan Moral Pancasila tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran PMP, tetapi

		juga ditekankan kepada pelajaran IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi) dan pelajaran Pendidikan Agama.
5.	Kurikulum 1984	Kurikulum ini juga disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Saat itu asumsi yang dibangun adalah kurikulum merupakan wahana belajar-mengajar yang dinamis dan dikembangkan terus menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Kurikulum ini berlaku kurang lebih 9 tahun.
6.	Kurikulum 1994	Kurikulum ini dapat dikatakan terlalu padat sehingga terlalu membebani siswa yang berdampak pada kemerosotan semangat belajar siswa sehingga mutu pendidikan semakin terpuruk.
7.	Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)	Semangat KBK terinspirasi dari UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Saat itu ada tiga kebijakan penting yang termuat dalam KBK yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Ujian Akhir Nasional (UAN)
8.	Kurikulum 2006 (KTSP)	Kurikulum 2006 memberi keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memerhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

2.3. Perkembangan Sosiologi di Indonesia

Di Indonesia, Sosiologi mulai diajarkan pada Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshoogeschool*) yang didirikan pada 1924 di Batavia. Saat itu, mata kuliah *Pengantar Sosiologi* diajarkan sebagai mata kuliah penunjang. Saat itu kita belum memiliki ahli-ahli Sosiologi. Semuanya didominasi oleh orang barat seperti Schrieke, Boeke atau Wertheim¹⁹. Pada kurun waktu tersebut, Sosiologi hanya dipandang sebagai ilmu Bantu dan hanya diajarkan di beberapa perguruan tinggi saja. Pengajarnya juga bukan orang yang secara khusus mendalami Sosiologi.

Pada tahun 1950-an, beberapa intelektual Indonesia menyelesaikan pendidikan sosiologi dari Amerika, Inggris dan Belanda. Mereka menerbitkan beberapa buku pengantar sosiologi, diantaranya Hassan Shadily (*Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*), Mayor Polak (*Sosiologi; Suatu Pengantar Ringkas dan Pengantar Sosiologi Pengetahuan, Hukum dan Politik*), Selo Soemardjan (*Social Changes in Yogyakarta*) dan Soelaiman Soemardi (bersama-sama dengan Selo Soemardjan menulis *Setangkai Bunga Sosiologi*)²⁰.

Perkembangannya cukup signifikan setelah didirikan Akademi Ilmu Politik pada 1964 di Yogyakarta yang kemudian bergabung dengan UGM. Mata kuliah Sosiologi tak lagi hanya diajarkan di mahasiswa ilmu hukum tetapi juga di bidang-bidang ilmu sosial lainnya. Saat itu juga pengaruh Amerika sangat dominan menggantikan tradisi Eropa yang sebelumnya dominan dalam studi mengenai Indonesia. Beberapa akademisi yang

¹⁹ Wertheim memiliki peran penting dalam perkembangan sosiologi Indonesia. Menurut Bachtiar, antara bulan Oktober 1956 dan Oktober 1957, dalam masa pertentangan politik antara Indonesia dan Belanda berkenaan dengan daerah Irian Barat (kini: Irian Jaya), Wertheim masih bersedia membantu perkembangan tenaga ahli Indonesia dalam bidang sosiologi dengan bertindak sebagai Gurubesar Tamu di Fakultas Pertanian di Bogor yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari Universitas Indonesia. Menurut Bachtiar: "dua diantara calon-calon doktor ini berhasil menyelesaikan tugas akademik mereka masing-masing sehingga memperoleh hak menggunakan gelar Doktor. Kedua tenaga ahli ini ialah Ir. Kampto Octomo (sekarang: Prof. Ir. Sayogyo, Guru Besar Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor) yang menulis disertasi berjudul "Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah W. Sekampung" dan menjalankan promosi di Universitas Indonesia tahun 1957". Lihat Harsja W. Bachtiar, *Willem Frederik Wertheim: Seorang Pengkaji Belanda tentang Masyarakat Indonesia* dalam Jurnal Studi Indonesia, Vol. 1 Tahun 1991

²⁰ Samuel, Hanneman dan Aziz Suganda (1997). *Sosiologi 1 untuk SMU Kelas 2*. Jakarta: Depdikbud, hal. 9. Lihat juga Samuel, Hanneman (1999). *The Development of Sociology in Indonesia: The Production of Knowledge, State Formation and Economic Change*. Disertasi pada Swinburne University of Technology, Australia (tidak dipublikasikan), hal. 146..

studi di Amerika kembali ke Indonesia. Mereka kemudian mengembangkan ilmu sosial termasuk Sosiologi. Disinilah Sosiologi menemukan ruangnya sendiri.

2.4 Kurikulum Sosiologi SMA

Berdasarkan penjelasan diatas, pada 1980-an, Sosiologi berkembang dengan pesat di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN). Ekspansinya cukup dinamis. Perkembangan berarti juga ditunjukkan dengan ditawarkannya mata pelajaran Sosiologi-Antropologi bagi siswa kelas II dan III SMA untuk Program A3 (Sosial) dan A4 (Bahasa) dalam rangka penerapan Kurikulum 1984 bagi SMA. Adalah Prof. H. Harsja W. Bachtiar, MA, Ph.D (almarhum) yang juga Guru Besar Sosiologi UI dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Periode 1983-1993 yang merintis dimasukkannya pendekatan Sosiologi ke dalam kurikulum SMA. Harsja merintis ini dengan visi agar lulusan SMA mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya dengan menggunakan sudut pandang ilmu-ilmu sosial (disiplin Sosiologi dan Antropologi) dengan harapan agar pikiran, perilaku dan sikapnya dilandasi pemahaman tersebut²¹. Hal yang sama dituturkan oleh Kamanto Sunarto. Menurutnya ;

“...seingat saya ide (alm) Harsja Bachtiar untuk memasukkan matapelajaran sosiologi dalam kurikulum SMA disampaikan secara lisan pada sambutan pembukaan suatu lokakarya di tahun 1980-an yang saya hadiri (sangat mungkin juga di forum lain yang tidak saya hadiri)”²²

Diajarkannya Pelajaran Sosiologi di SMA hanyalah salah satu gagasan cemerlang Harsja Bachtiar sebagai sosiolog. *Pertama*, gagasan tersebut menunjukkan bahwa visi dan komitmen Harsja dalam membangun sekaligus menempatkan ilmu sosial (dalam hal ini Sosiologi) sebagai disiplin ilmu yang penting dalam merespon perubahan masyarakat. *Kedua*, gagasan tersebut dapat dibaca sebagai langkah strategis dalam mentransformasikan Sosiologi kepada pelajar SMA yang mewakili generasi muda. Hal ini menunjukkan Harsja sudah memikirkan sejak awal bahwa Sosiologi harus lebih

²¹ Sunarto, Kamanto, *Strategi Penyempurnaan Kurikulum Sosiologi (SMU)* dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* No. 018 Tahun ke-5, September 1999, hal. 40. Jakarta:Balitbang Depdikbud.

²²Wawancara dengan Kamanto Sunarto (Guru Besar Sosiologi FISIP UI) melalui e-mail, 19 Mei 2008.

disosialisasikan sejak awal kepada berbagai kalangan, terutama pelajar SMA²³. Lebih jauh Sunarto juga mengatakan:

“kita perlu ingat bahwa sebelum itu, yaitu di akhir tahun 1969-an, beliau jugalah yang mempunyai ide untuk memasukkan matakuliah Ilmu Sosial Dasar (ISD), Ilmu Budaya Dasar (IBD) dan Ilmu Alamiyah Dasar (IAD) di kurikulum perguruan tinggi--suatu ide yang di awal 1970-an mulai diimplementasikan”²⁴

Berdasarkan penjelasan Sunarto menggambarkan adanya visi yang jelas sekaligus kontinuitas antara gagasan diterapkannya mata kuliah ISD, IBD, IAD di perguruan tinggi dengan pelajaran Sosiologi di SMA. Sementara itu dalam pandangan Fernandez, latar belakang diajarkannya Sosiologi-Antropologi adalah :

“perkiraan saya Pak Harsya menganggap masyarakat semakin dinamis. Dalam pandangan Pak Harsya ilmu sosial perlu dikembangkan lebih serius. Pak Harsya juga menganggap bahwa ilmu sosial yang sebenarnya di SMA adalah Sosiologi bukan Ekonomi. Dengan cara ini menurut saya Pak Harsya sudah memiliki visi dan komitmen yang besar dalam pengembangan ilmu sosial khususnya sosiologi.”²⁵

Sampai hari ini di SMA maupun Madrasah Aliyah (MA), Sosiologi menjadi mata pelajaran inti/wajib bagi siswa kelas 1 (sekarang kelas X), khususnya mereka yang masuk program IPS (yaitu mulai kelas II atau kelas XI dan kelas III atau kelas XII) mendapatkan jam pelajaran yang lebih, sekitar 4-6 jam selama 1 minggu. Dibandingkan dengan Antropologi, Sosiologi jauh lebih memiliki dinamika tersendiri. Mulai Tahun Pelajaran 2007-2008, mata pelajaran Antropologi diintegrasikan ke dalam Sosiologi. Konsekuensi logisnya, materi-materi Antropologi hanya mendapat jam pelajaran yang terbatas. Disisi lain sejak Tahun Pelajaran 2007/2008, siswa kelas VII SMP materi-materi Sosiologi sudah mulai diajarkan, namun masih diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS Terpadu. Di jenjang SMP ini, siswa sudah dikenalkan dengan berbagai materi Sosiologi.

²³ Lihat juga Sunarto, Kamanto (1989). *Sejarah Perkembangan Sosiologi di Indonesia* dalam Malo, Manasse (ed) (1989). *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade 1980-an*. Jakarta:PAU UI dan Rajawali Press, hal. 209-210. Menurutnya, “melalui mata pelajaran ini para siswa SMA telah sejak dini diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar Sosiologi-Antropologi”. Mengenai ide dasar Harsja Bachtiar tentang IBD, ISD dan IAD lihat Darma, Budi (2001). *Menengok Kembali Ilmu Budaya Dasar* dalam Sindhunata (ed). (2001). *Pendidikan:Kegelisahan Sepanjang Zaman (Pilihan Artikel Basis)*. Yogyakarta:Kanisius, hal.233; 235. Dalam pandangan Darma, melalui IBD, ISD dan IAD Harsja ingin menumbuhkan apresiasi di kalangan mahasiswa terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai kebudayaan

²⁴ ibid

²⁵ Wawancara dengan Drs. Daniel Fernandez, M.Si, 16 Mei 2008

Memang materi yang diberikan tak jauh berbeda dengan jenjang SMA, namun yang membedakan adalah pendalaman/pengenalannya.

Pelajaran Sosiologi mulai diajarkan sejak 1984, tepatnya dituangkan dalam Kurikulum 1984. Namun demikian, saat itu pelajaran Sosiologi diajarkan bersamaan dengan Antropologi sehingga nama pelajarannya adalah 'Sosiologi-Antropologi'. Sebelum Kurikulum 1984, pelajaran Sosiologi-Antropologi belum pernah diajarkan. Bahkan berdasarkan penelusuran pada dokumen resmi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), pada Kurikulum 1975 hanya diajarkan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk jenjang SMA. Beberapa ciri khas yang ada dalam pelajaran tersebut. *Pertama*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner. Artinya, dari berbagai bidang studi yang dipelajari (Sejarah, Ekonomi, Geografi) lebih ditekankan untuk diajarkan dalam satu pendekatan yang terkait antara satu bidang pelajaran dengan bidang pelajaran lainnya. Dalam pandangan Depdikbud :

“...bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan (suatu sistem) yang permasalahannya bersangkut paut dan pemecahannya pun memerlukan pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan komprehensif dari sudut ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial, geografi, sejarah, antropologi, dan sebagainya.”²⁶

Misalnya, pembahasan tentang materi “Zaman Purba Indonesia” dalam sub bidang studi Sejarah, meskipun tinjauan pokoknya adalah dari sudut ilmu Sejarah, tetapi dalam pembahasan dan pengkajiannya dikaitkan dengan tinjauan perkembangan ekonomi waktu itu, tinjauan geografi, maupun tinjauan sosio-kultural²⁷. *Kedua*, pelajaran IPS yang diajarkan di SMA sesuai dengan Kurikulum 1975 sangat menekankan pemahaman dan penguasaan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945. Transformasi bahwa Pancasila menjadi falsafah hidup yang mampu menyelamatkan bangsa dan menjamin kesejahteraan hidup bersama menjadi muatan penting pelajaran IPS di SMA. Singkatnya, muatan moral Pancasila selain dibebankan pada pelajaran PMP, Pendidikan Agama tetapi juga dibebankan kepada pelajaran IPS.

Dalam prakteknya, pelajaran IPS di SMA diajarkan mencakup bidang PMP, Sejarah, Geografi/Kependudukan, Antropologi-Budaya, Ekonomi-koperasi dan Tata

²⁶ Depdikbud (1979). *Kurikulum SMA 1975; Pedoman Pelaksanaan Kurikulum (Buku:III A1, Pedoman Khusus)*. Jakarta:Balai Pustaka, hal 47

²⁷ Depdikbud, *ibid.* hal 50.

Buku-Hitung Dagang. Bidang Sosiologi belum diajarkan sama sekali. Pelajaran IPS diberikan sejak kelas I. Di semester I tersedia 7 jam pelajaran tiap minggu dengan penjatahan waktu sebagai berikut :

1. 3 Jam pelajaran tiap minggu untuk Sejarah
2. 2 Jam pelajaran tiap minggu untuk Geografi/Kependudukan
3. 2 Jam pelajaran tiap minggu untuk Ekonomi/Koperasi

Di semester-semester berikutnya diberikan dalam bentuk sub bidang studi tersendiri, dengan jatah waktu seperti yang tersebut di dalam struktur Program Kurikulum SMA. Kurikulum pelajaran IPS pada Kurikulum 1975 berubah seiring dengan penggunaan Kurikulum 1984. Dalam kurikulum SMA 1984 terbagi ke dalam dua kelompok yaitu :1) Program Inti, 2)Program Pilihan. Program inti merupakan *core curriculum* yang meliputi 15 mata pelajaran yaitu²⁸ :

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Moral Pancasila
3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa
4. Bahasa dan Sastra Indonesia
5. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia
6. Ekonomi
7. Geografi
8. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan
9. Pendidikan Seni
10. Pendidikan Keterampilan
11. Matematika
12. Biologi
13. Fisika
14. Kimia
15. Bahasa Inggris

²⁸ Winataputra (1989). *Konsep dan Masalah Pengajaran Ilmu Sosial di Sekolah Menengah*. Jakarta:Depdikbud, hal. 36.

Adapun program pilihan berfungsi sebagai mata pelajaran pendalaman dan perluasan yang disesuaikan dengan masing-masing Program Studi. Kurikulum 1984 dikenal dengan penyaluran Program Studi Akademis (A) dan Program Vokasional (B). Dalam pelaksanaannya, hanya Program A yang terlaksana, sementara Program B ditanggguhkan. Program Studi Akademis terdiri dari :

- Program A1 yaitu Program Studi Fisika
- Program A2 yaitu Program Studi Biologi
- Program A3 yaitu Program Studi Ilmu-ilmu Sosial
- Program A4 yaitu Program Studi Bahasa dan Budaya.

Pelajaran Sosiologi-Antropologi sendiri diajarkan di Program A3 bersama dengan pelajaran lainnya yaitu Ekonomi, Tata Negara, Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lain. Tujuan diajarkannya mata pelajaran ini adalah :

“mengembangkan kepekaan menganalisa kondisi dan faktor yang berperan dalam kenyataan sosial yang dihadapi, melalui pemahaman mengenai realita kehidupan sosial dan dinamika manusia sebagai makhluk sosial dengan kebudayaan sebagai pedoman hidupnya, pemahaman mengenai kewajaran dan keanekaragaman, kesamaan dan kesejajaran budaya di kalangan kelompok-kelompok etnis dan kesatuan-kesatuan masyarakat lainnya, pemahaman mengenai peranan dan perkembangan kebudayaan nasional bagi bangsa Indonesia serta kemampuan mengidentifikasi kendala-kendala dan pendorong-pendorong sosial budaya terhadap pembangunan”²⁹

Berdasarkan fungsinya, pelajaran ini berfungsi :

“...membentuk sikap rasional dan tanggungjawab terhadap proses-proses maupun masalah-masalah sosial budaya serta sikap dan tindakan menghindarkan diri dari konflik-konflik sosial budaya dalam rangka integral nasional”³⁰

Berdasarkan tujuan dan fungsi tersebut, masih sangat jelas bahwa kurikulum pelajaran ini menggabungkan kajian sosial kemasyarakatan yang menjadi kajian utama sosiologi dengan kajian tentang budaya yang menjadi kajian utama Antropologi. Secara lebih spesifik, mata pelajaran ini memiliki fokus kajian yang berbeda. Sosiologi lebih menekankan kepada hubungan antarmanusia atau interaksi social dan proses yang timbul

²⁹ Ibid, hal. 41.

³⁰ ibid

sebagai akibat dari hubungan manusia atau interaksi di dalam masyarakat.³¹ Sementara itu Antropologi lebih menekankan pada kajian kebudayaan-kebudayaan yang hidup nyata di dalam masyarakat dari sebanyak mungkin suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Secara lebih terinci yang dipelajari dari Antropologi adalah adat istiadat, tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan masyarakat pedesaan dan lain sebagainya.³² Perbedaan kajian Sosiologi dan Antropologi juga dapat dilihat pada *key concepts* masing-masing kajian. Perbedaan *key concepts* tersebut disajikan dibawah ini :

Tabel 2.2
Perbedaan *Key Concepts* Sosiologi dan Antropologi
Dalam Kurikulum 1984

No	Sosiologi	Antropologi
1.	Sosialisasi (<i>socialization</i>)	Kebudayaan (<i>culture</i>)
2.	Peranan (<i>role</i>)	Unsur Kebudayaan (<i>culture elements</i>)
3.	Norma (<i>norm</i>)	Kompleks Budaya (<i>culture complex</i>)
4.	Sanksi (<i>sanction</i>)	Enkulturasi (<i>enculturation</i>)
5.	Status (<i>status</i>)	Wilayah Budaya (<i>culture area</i>)
6.	Pranata (<i>institution</i>)	Penyebaran ide (<i>diffusion</i>)
7.	Masyarakat (<i>community</i>)	Etnosentrisme (<i>ethnocentrism</i>)
8.	Saling ketergantungan (<i>interdependence</i>)	Tradisi (<i>tradition</i>)

Sumber : Winataputra (1989:72-73)

Diajarkannya pelajaran Sosiologi-Antropologi pada Kurikulum 1984 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional. Hal itu berarti setiap mata pelajaran ilmu-ilmu sosial disesuaikan dan memiliki hubungan fungsional dengan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut dijelaskan dalam rumusan kurikulumnya:

“siswa memahami konsep-konsep mendasar mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial, hakikat masyarakat, dan hakikat kebudayaan sehingga siswa

³¹ Luth, Nursal dan Daniel Fernandez (1986).*Sosiologi dan Antropologi Jilid 1*. Jakarta; PT Galaxy Puspa Mega, hal. 3.

³² Ibid.

dalam batas-batas tertentu setelah mengikuti pelajaran ini akan mempunyai kemampuan membuat generalisasi yang mendasar dan umum mengenai kenyataan sosial yang dihadapi dan dapat mengembangkan sendiri kemampuan analisis secara lebih mendalam salah satu bidang yang ditekuni”³³

Satu hal yang menonjol dalam kurikulum 1984, adalah dimasukkannya pelajaran PSPB sebagai pelajaran wajib dari SD sampai SMA, baik di sekolah umum maupun swasta. Pada saat itu, Mendikbud dipegang Nugroho Notosusanto. Ide dasar Nugroho mengadakan pelajaran PSPB adalah agar murid mengenal bangsanya sendiri dengan lebih baik dan mengambil pelajaran dari sejarah itu. Pelajaran baru ini sempat menimbulkan kontroversi, karena tumpang tindih dengan pelajaran IPS, Sejarah Nasional dan PMP. Tujuannya antara lain agar siswa menyadari/meyakini: a) Penjajahan Belanda menyebabkan rakyat Indonesia menderita; b) Kebenaran perjuangan pahlawan mengusir penjajah; c) Pemaksaan kehendak PKI untuk menghancurkan NKRI melalui aksi-aksi sepihak; d) Kesatuan-kesatuan aksi melawan PKI didorong keberanian membela kemerdekaan dan keadilan, e) Orde Baru mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

Dari perkembangan sistem pendidikan dalam rentang sejarah Indonesia sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa terdapat bidang-bidang studi yang terus menerus berubah tetapi tetap ada dalam rentang perubahan sistem sosial politik negara. Bidang studi tersebut sangat potensial sebagai artikulasi kepentingan kekuasaan rezim dalam teks-teks pendidikan yang dihasilkan. Sosiologi hanyalah salah satu mata pelajaran yang menjadi ruang bagaimana kekuasaan beroperasi dan menyebar.

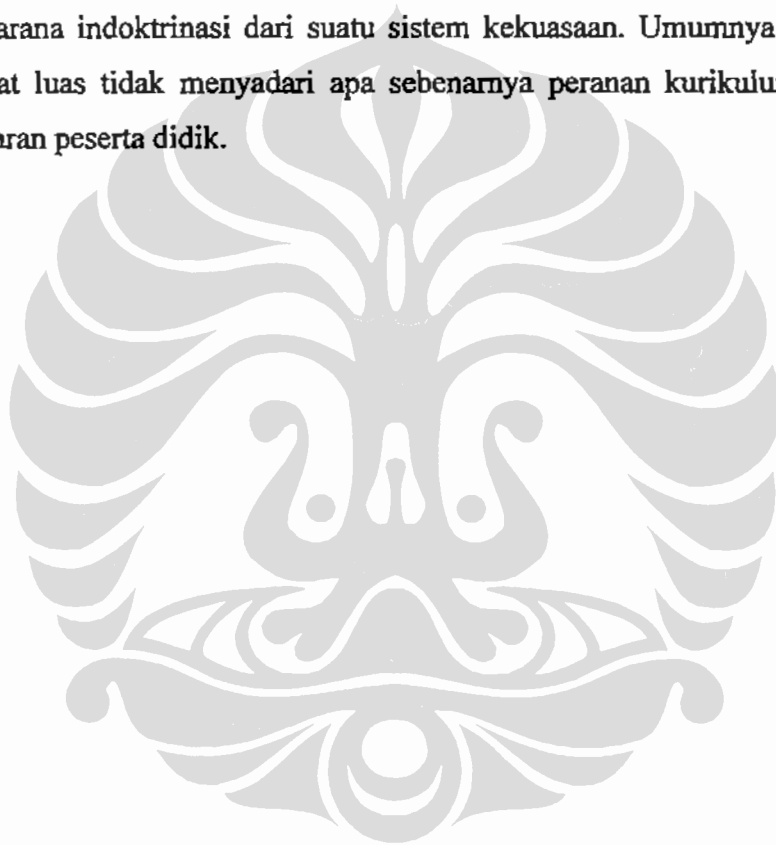
2.5 Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas selama masa Orde Baru lahir empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya muncul Kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama Kurikulum 1975 yang Disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru, yakni Kurikulum 1994. Kurikulum itu menjadi

³³ Ibid, hal. 59

kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru. Membaca runtutan kurikulum yang ada di Indonesia memberikan satu catatan penting bahwa produksi kurikulum selalu berkaitan dengan pergantian kekuasaan. Produksi kurikulum tersebut sebenarnya dapat dibaca dari orientasi politik kekuasaan yang bersangkutan. Studi ini kiranya berupaya menganalisa bagian tersebut.

Menurut Bourdieu, setiap tindakan pedagogis yang bertujuan untuk mereproduksi kebudayaan dapat disebut kekerasan simbolis yang sah. Kekuatan kekerasan ini berasal dari hubungan kekuasaan sesungguhnya yang disembunyikan oleh kekuatan pedagogis. Kurikulum yang berlaku dalam suatu negara, termasuk Indonesia, sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Umumnya para pendidik dan masyarakat luas tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum di dalam proses pembelajaran peserta didik.



BAB III

WACANA DOMINAN DALAM KURIKULUM SOSIOLOGI SMA 2006 DAN 1984: PRODUK PERTARUNGAN SIMBOLIK

3.1 Pengantar

Merujuk kepada Bourdieu, arena sosial merupakan arena pertarungan kekuasaan, didalamnya berbagai agen bertarung untuk memperebutkan berbagai kapital. Dengan demikian, pada dasarnya kurikulum juga dapat dipahami sebagai sebuah ruang sosial yang mana di dalamnya berlangsung pertarungan kekuasaan yang direpresentasikan dengan berbagai wacana melalui teks yang sarat dengan (makna) kekuasaan. Kurikulum Sosiologi SMA tentu saja jika mengacu kepada Bourdieu merupakan sebuah produk pengetahuan yang dihasilkan melalui kontestasi berbagai agen dibelakangnya. Dengan demikian teks-teks yang tersaji dalam kurikulum sosiologi tentu saja bukanlah sebuah gejala tunggal. Bab ini akan menjelaskan bagaimana Kurikulum Sosiologi SMA menjadi ruang pertarungan simbolik berbagai agen yang terlibat di dalamnya.

Kurikulum yang berisi rangkaian teks-teks yang tersusun secara sistematis pada dasarnya tidaklah berdiri sendiri, bukan pula merupakan gejala yang tunggal serta dianggap dianggap alamiah dan wajar. Namun, berdasarkan karakteristik analisa wacana kritis, teks-teks tersebut merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat¹. Oleh karena itu gagasan Bourdieu tentang kurikulum sebagai ranah kekuasaan sejalan dengan kajian analisa wacana kritis, yaitu membongkar bagaimana kekuasaan beroperasi dalam kurikulum melalui serangkaian teks-teks yang tersistematisasikan dengan baik.

Untuk menelisik pertarungan simbolik tersebut dalam penelitian ini digunakan metode analisis wacana dengan menggunakan kerangka analisis model Fairclough dimana analisis didasarkan pada tiga elemen dasar yaitu (1) representasi yang mengungkap bagaimana sesuatu ditampilkan dalam teks. (2) relasi, yang mengungkap hubungan partisipan dalam teks ditampilkan, dan (3) identitas, yang mengungkap

¹ Eriyanto (2001). op.cit, hal. 11

bagaimana identitas penulis ditampilkan dan dikonstruksikan dalam teks. Penelitian dalam level teks ini menggunakan model *framing* untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, yaitu dengan menggunakan model Gamson dan Modigliani. Metode ini merupakan sebuah upaya untuk mengungkap wacana dominan kekuasaan yang direpresentasikan melalui wacana yaitu dalam bentuk teks. Analisis dibahas berdasarkan kuantitas jumlah tema tentang wacana dominan yang muncul dalam setiap periode kurikulum. Analisis *framing* dilakukan terhadap tema kekuasaan dominan yang muncul dengan menggunakan kerangka Gamson dan Modigliani. Dalam penelitian ini tema-tema kekuasaan yang mungkin muncul adalah :

1. Keteraturan sosial
2. Integrasi masyarakat
3. Hak Asasi Manusia
4. Persatuan dan Kesatuan
5. Masyarakat majemuk
6. Kemajuan Material (Pembangunan)
7. Modernisasi

Tema-tema tersebut kemungkinan akan muncul dalam kurikulum Sosiologi SMA. Tema-tema itu dilengkapi dengan berbagai tujuan pembelajaran, ruang lingkup pembahasan, maupun sub pokok bahasan. Dengan berbagai data tersebut, akan dianalisa bagaimana praktek kekuasaan menyebar secara diskursif dan simbolik dalam kurikulum Sosiologi SMA 2006 (KBK) dan Kurikulum 1984. Dengan demikian, dalam studi ini menempatkan kurikulum sebagai gejala yang dinamis, yang mana menjadi ranah pertarungan kekuasaan secara simbolik.

3.2 Analisis Teks Kurikulum Sosiologi

Sebagaimana sudah dijelaskan di bagian awal, studi ini menekankan pada Kurikulum 2006 (KTSP). Analisa Kurikulum 2006 yang merupakan produk rezim pasca Orde Baru dibandingkan dengan Kurikulum 1984 yang merupakan kurikulum sosiologi pertama produk Orde Baru. Dibawah ini adalah analisa kedua kurikulum tersebut.

Sebagai pengkayaan, disinggung juga dua kurikulum sosiologi lainnya yaitu Kurikulum 1994 dan Kurikulum 2004.

3.2.1. Analisis Kurikulum Sosiologi 2006 (KTSP)

Kurikulum Sosiologi berdasarkan 2006 merupakan penyempurnaan terhadap Kurikulum 2004. Hal tersebut dilakukan seiring dengan dibentuknya Badan standar Pendidikan Nasional (BSNP) yang berwenang dalam menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP). BSNP merupakan suatu lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Terdapat tujuh standar pendidikan yang dikeluarkan BSNP, yaitu : (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Penilaian Pendidikan. Adanya tujuh standar tersebut merupakan implementasi UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 19/1995 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). PP itu memberikan amanat tentang perlunya penyusunan dan pelaksanaan tujuh SNP. Dalam prakteknya, kurikulum ini disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Semangat pemberian kekuasaan/wewenang pengembangan kurikulum ke satuan pendidikan, pengembangan KTSP, ini mirip dengan konsep *school based curriculum development* (SBCD) di Australia yang mulai ditetapkan pertengahan 1970-an. Pengembangan seperti itu muncul diawali wacana yang berkembang di kalangan pelaksana pendidikan sekolah dalam hal ini guru-guru di Australia dan negara lainnya pada awal 1970-an. Wacana itu pada intinya adalah tuntutan lebih banyak kebebasan dalam menentukan kurikulum oleh warga sekolah.³ Setelah Kurikulum 2004 tidak diberlakukan lagi, kurikulum hanya disusun dalam bentuk Standar Isi. Sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum dalam bentuk silabus sesuai dengan potensi dan kemampuan sekolah. Dalam Kurikulum 2006 ini, pelajaran sosiologi dijelaskan sebagai :

² Informasi lebih lengkap tentang BSNP, lihat <http://www.bsnp-indonesia.org>

³ *KTSP, Dongkrak Mutu Pendidikan dalam Media Indonesia*, 17 Januari 2008

“sosiologi ditinjau dari sifatnya digolongkan sebagai ilmu pengetahuan murni (*pure science*) bukan ilmu pengetahuan terapan (*applied science*). Sosiologi dimaksudkan untuk memberikan kompetensi kepada peserta didik dalam memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sampai pada terciptanya integrasi sosial”⁴

Dalam prakteknya, Sosiologi diajarkan sejak kelas X SMA/Madrasah Aliyah. Sejak Tahun Pelajaran 2006/2007, pada pelajaran Sosiologi juga diberikan pada tingkat pendidikan dasar (SMP) sebagai bagian integral dari IPS. Secara lebih lengkap mengenai alokasi waktu pelajaran Sosiologi di SMA/MA dijelaskan dibawah ini :

Tabel 3.1
Alokasi Jam Pelajaran Sosiologi SMA/MA
Kurikulum 2006

KELAS/SEMESTER						Jumlah
X		XI (Program Ilmu Sosial)		XII (Program Ilmu Sosial)		
1	2	1	2	1	2	16
2	2	3	3	3	3	

Sumber : BSNP (2006)

Sebelum dilakukan dianalisis teks, peneliti melakukan analisis isi secara kuantitatif tema-tema dominan yang muncul dalam Kurikulum 2006. Unit analisis adalah Kurikulum 2006 yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Sesuai dengan hasil analisis yang menggambarkan gagasan sentral, maka dapat ditabelkan skala persentasenya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Frekuensi Wacana Dominan dalam Kurikulum Sosiologi 2006

Periode	Wacana Dominan	Frekuensi	Persentase
2006 (KTSP)	1. Keteraturan sosial	12	60
	2. Masyarakat Multikultural	3	15
	3. Perubahan Sosial	2	10
	4. Keterampilan Sosial	3	15
	Jumlah	20	100

Persentasi diambil berdasarkan kompetensi dasar

⁴ Lihat <http://www.bsnp-indonesia.org> (2 Juni 2008)

Berdasarkan tabel diatas, tema dominan yang termuat dalam Kurikulum 2006 masih menjelaskan tema keteraturan sosial yang menjiwai seluruh pengajaran yang ada. Tema ini masih menjadi *mainstream* dalam pergulatan Kurikulum Sosiologi di SMA. Hal tersebut cukup beralasan karena dari awal pelajaran Sosiologi pada Kurikulum 2006 ini memang diorientasikan pada terciptanya integrasi sosial. Walaupun tema keteraturan sosial masih menjadi wacana dominan, namun berbeda konteks dengan keteraturan sosial pada Kurikulum 1984 dan 1994. Perbedaan konteks tersebut terlihat pada diskursus pembangunan yang tidak lagi menjadi *mainstream* pada kurikulum pasca Orde Baru. Pelajaran Sosiologi pasca Orde Baru (Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006) tidak lagi dipaksakan untuk ‘mengamankan’ pembangunan, sebagaimana menjadi dilegitimasi oleh terciptanya keteraturan sosial. Tema keteraturan sosial dalam Kurikulum 2006 berada pada konteks, seperti yang dijelaskan dalam Standar Isi dan Kompetensi Dasarnya:

“dalam kedudukannya sebagai sebuah disiplin ilmu sosial yang sudah relatif lama berkembang di lingkungan akademika, secara teoretis sosiologi memiliki posisi strategis dalam membahas dan mempelajari masalah-masalah sosial-politik dan budaya yang berkembang di masyarakat dan selalu siap dengan pemikiran kritis dan alternatif menjawab tantangan yang ada”⁵

Konteks tersebut sebenarnya juga dijelaskan oleh Kurikulum 2004, yaitu ranah pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai isu-isu kontemporer yang sedang dihadapi, yaitu isu globalisasi yang di dalamnya mencakup demokratisasi, desentralisasi dan otonomi, penegakan HAM, *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), emansipasi, kerukunan hidup bermasyarakat, dan masyarakat yang demokratis. Selain penjelasan diatas, perbedaan tema dominan pada Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2004 terletak pada beberapa hal. *Pertama*, secara materi Kurikulum 2006 lebih sedikit dibandingkan Kurikulum 2004. Hal tersebut dikarenakan materi dan pokok bahasan diserahkan kepada sekolah/daerah untuk dikembangkan sendiri. *Kedua*, tema globalisasi, modernisasi maupun dinamika budaya tidak lagi dijelaskan pada KTSP. Hal ini lebih diberikan kelonggaran kepada tiap satuan pendidikan untuk menyusun silabus sesuai

⁵ ibid

potensi dan kemampuan sekolah. Untuk menjelaskan bagaimana wacana dominan dalam Kurikulum Sosiologi SMA 2006 dijelaskan dibawah ini :

Tabel 3.3

Konstruksi Wacana Dominan Kurikulum Sosiologi SMA 2006

Keteraturan sosial	Keteraturan hidup harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Keteraturan sosial juga dibentuk atas melalui interaksi sosial sebagai dasar pengembangan pola keteraturan dan dinamika kehidupan sosial
Masyarakat Multikultural	Masyarakat multikultural dalam Kurikulum 2006 dijelaskan sebagai akumulasi dari keanekaragaman berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat.
Perubahan Sosial	Perubahan Sosial dijelaskan sebagai sesuatu yang <i>inheren</i> dalam masyarakat. Dampak perubahan sosial harus diantisipasi oleh setiap warga masyarakat.
Keterampilan Sosiologi	Masalah-masalah sosial di sekitar masyarakat dipahami dengan cara merancang, menulis dan melaporkan penelitian

Sumber: data primer (2008)

Untuk menganalisa wacana-wacana dominan pada Kurikulum Sosiologi 2006 disajikan penjelasan dibawah ini :

1. Deskripsi (*Text Analysis*)

Sebagaimana akan terbaca dalam latar belakang historis kurikulum ini diproduksi, Kurikulum 2006 mengkonstruksikan keteraturan sosial dalam merespon berbagai isu kontemporer yang dihadapi Indonesia: globalisasi yang di dalamnya mencakup demokratisasi, desentralisasi dan otonomi, penegakan HAM, *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), emansipasi, kerukunan hidup bermasyarakat, dan masyarakat yang demokratis. Semangat otonomi daerah dan desentralisasi masih berpengaruh kuat dalam produksi Kurikulum 2006.

2. Interpretasi (*Processing Analysis*)

Dari konstruksi tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam, pemberian wewenang lebih besar kepada satuan pendidikan di masing-masing daerah untuk

mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan kemampuan lokal pada dasarnya ingin memberdayakan setiap komponen sekolah dalam keterlibatannya sebagai *stake holder* penting pendidikan. Kata kuncinya terletak pada 'pemberdayaan pendidikan'. Kurikulum 2006 merupakan produk dari BSNP yang menjadi salah satu kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara resmi Kurikulum 2006 ini mulai dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2006/2007. Lahirnya Kurikulum 2006 sendiri tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Kurikulum 2004 yang belum sepenuhnya dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Saat itu di berbagai daerah masih banyak yang belum memahami dan melaksanakan Kurikulum 2004. Bahkan, berbagai program sosialisasi Kurikulum 2004 masih intensif dilaksanakan di berbagai daerah. Terbukti KBK 2004 yang telah disosialisasikan sejak tahun 2001 sampai sekarang masih dinilai belum berhasil. Tiba-tiba, seiring dengan pergantian pemerintahan dari Megawati ke SBY, Kurikulum 2006 diluncurkan kepada dunia pendidikan. Akibatnya, tidak sedikit sekolah-sekolah yang tidak siap melaksanakan Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 adalah bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Eksplanasi (*Social Analysis*)

Berdasarkan konstruksi wacana dominan diatas, tampaknya Kurikulum ini ingin membangun semangat pemberdayaan dari komponen sekolah dalam mengembangkan Kurikulum 2006. Sama halnya dengan Kurikulum 2004, Kurikulum 2006 juga mewacanakan isu-isu kontemporer yang tengah melanda Indonesia. Hal ini juga dijelaskan oleh salah seorang informan :

"setelah Orde Baru, ada beberapa perubahan dibandingkan dengan di era Orde Baru. Misalnya, mulai diperkenalkan wacana reformasi, demokrasi dan HAM. Pada Orde Baru sangat sensitive membahas materi tersebut. Meskipun juga ada beberapa yang terkait. Tetapi materi-materi itu konteks sosialnya berbeda. Materi tentang demokrasi misalnya lebih mengagung-agungkan Demokrasi Pancasila"⁶

Isu Otonomi Daerah dan desentralisasi adalah dua isu yang menjadi *mainstream* pengembangan pendidikan di Indonesia. Semangat ini sebenarnya dapat dibaca sebagai refleksi terhadap dinamika dan pergulatan kurikulum dalam pendidikan Indonesia,

⁶ Wawancara Dra. Kunmaryati, instruktur senior sosiologi, 23 Mei 2008.

artinya menggeser paradigma dari *top down* ke *bottom up*. Adapun perbedaan Kurikulum 2004 dengan Kurikulum 2006 disajikan dibawah ini secara lebih lengkap:

Tabel 3.4

Perbandingan Kurikulum 2004 dan 2006

Aspek	Kurikulum 2004	Kurikulum 2006
Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Tap MPR/GBHN Tahun 1999-2004 • UU No. 20/1999 – Pemerintah-an Daerah • UU Sisdiknas No 2/1989 kemudian diganti dengan UU No. 20/2003 • PP No. 25 Tahun 2000 tentang pembagian kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 20/2003 – Sisdiknas • PP No. 19/2005 – SPN • Permendiknas No. 22/2006 – Standar Isi • Permendiknas No. 23/2006 – Standar Kompetensi Lulusan
Implementasi / Pelaksanaan Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan dengan Keputusan/Peraturan Mendiknas RI • Keputusan Dirjen Dikdasmen No.399a/C.C2/Kep/DS/2004 Tahun 2004. • Keputusan Direktur Dikmenum No. 766a/C4/MN/2003 Tahun 2003, dan No. 1247a/C4/MN/2003 Tahun 2003. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mendiknas RI No. 24/2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 22 tentang SI dan No. 23 tentang SKL
Ideologi Pendidikan yang Dianut	<ul style="list-style-type: none"> • Liberalisme Pendidikan : terciptanya SDM yang cerdas, kompeten, profesional dan kompetitif 	<ul style="list-style-type: none"> • Liberalisme Pendidikan : terciptanya SDM yang cerdas, kompeten, profesional dan kompetitif
Sifat (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Cenderung Sentralisme Pendidikan : Kurikulum disusun oleh Tim Pusat secara rinci; Daerah/Sekolah hanya melaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cenderung Desentralisme Pendidikan : Kerangka Dasar Kurikulum disusun oleh Tim Pusat; Daerah dan Sekolah dapat mengembangkan lebih lanjut.
Sifat (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum disusun rinci oleh Tim Pusat (Ditjen Dikmenum/ Dikmenjur dan Puskur) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum merupakan kerangka dasar oleh Tim BSNP
Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Kompetensi • Terdiri atas : SK, KD, MP dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Kompetensi • Hanya terdiri atas : SK dan KD.

	Indikator Pencapaian	Komponen lain dikembangkan oleh guru
Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Berubahan relatif banyak dibandingkan kurikulum sebelumnya (1994 suplemen 1999) Ada perubahan nama mata pelajaran Ada penambahan mata pelajaran (TIK) atau penggabungan mata pelajaran (KN dan PS di SD) 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan mata pelajaran untuk Mulok dan Pengembangan diri untuk semua jenjang sekolah Ada pengurangan mata pelajaran (Misal TIK di SD) Ada perubahan nama mata pelajaran KN dan IPS di SD dipisah lagi Ada perubahan jumlah jam pelajaran setiap mata pelajaran
Pengembangan Kurikulum lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none"> Hanya sekolah yang mampu dan memenuhi syarat dapat mengembangkan KTSP. Guru membuat silabus atas dasar Kurikulum Nasional dan RP/Skenario Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> Semua sekolah /satuan pendidikan wajib membuat KTSP. Silabus merupakan bagian tidak terpisahkan dari KTSP Guru harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sumber : Rijono (2008) dan sumber lain

Berdasarkan analisa diatas, secara lebih lengkap Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 2006 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pelajaran Sosiologi SMA/MA
Berdasarkan Kurikulum 2006

Kelas X, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami perilaku keteraturan hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat	1.1 Menjelaskan fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungan 1.2 Mendeskripsikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat 1.3 Mendeskripsikan proses interaksi sosial sebagai dasar pengembangan pola keteraturan dan dinamika kehidupan sosial

	keteraturan dan dinamika kehidupan sosial
--	---

Kelas X, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian	2.1 Menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam pembentukan kepribadian 2.2 Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap anti sosial 2.3 Menerapkan aturan-aturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat

Kelas XI, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami struktur sosial serta berbagai faktor penyebab konflik dan mobilitas sosial	1.1 Mendeskripsikan bentuk-bentuk struktur sosial dalam fenomena kehidupan 1.2 Menganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam masyarakat 1.3 Menganalisis hubungan antara struktur sosial dengan mobilitas sosial

Kelas XI, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
2. Menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural	2.1 Mendeskripsikan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat multikultural 2.2 Menganalisis perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural 2.3 Menganalisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural

Kelas XII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami dampak perubahan sosial	1.1 Menjelaskan proses perubahan sosial di masyarakat 1.2 Menganalisis dampak perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat
2. Memahami lembaga sosial	2.1 Menjelaskan hakikat lembaga sosial 2.2 Mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga sosial 2.3 Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga sosial

Kelas XII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Mempraktikkan metode penelitian sosial	3.1 Merancang metode penelitian sosial secara sederhana 3.2 Melakukan penelitian sosial secara sederhana 3.3 Mengkomunikasikan hasil penelitian sosial secara sederhana

3.2.2 Analisis Kurikulum Sosiologi-Antropologi 1984

Sebagaimana dijelaskan dibagian sebelumnya, Kurikulum 1984 ini merupakan kurikulum pertama yang membahas materi pelajaran Sosiologi-Antropologi. Sebagai sesuatu yang baru, tentu saja menarik untuk lebih secara mendalam membahas gejala kekuasaan dalam kurikulum tersebut. Pelajaran Sosiologi-Antropologi yang tertuang dalam Kurikulum 1984 merupakan terobosan baru dalam perkembangan kurikulum di Indonesia. Dibandingkan Kurikulum 1975, pelajaran Sosiologi dalam Kurikulum 1984 mengalami perubahan yang signifikan. Secara lebih lengkap rincian alokasi waktu pelajaran Sosiologi-Antropologi disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Alokasi Jam Pelajaran Sosiologi-Antropologi SMA Kurikulum 1984

No	Program	KELAS/SEMESTER						Jumlah
		I		II		III		
		1	2	1	2	1	2	
1.	A3 (Ilmu-Ilmu Sosial)	-	-	3	3	3	3	12
2.	A4 (Pengetahuan Budaya)	-	-	3	3	6	4	14

Sumber : Balitbang Depdikbud (1986)

Berdasarkan data tersebut, tidak ada perbedaan substansi materi dalam kurikulum Sosiologi-Antropologi untuk program A3 maupun A4. Hal yang membedakan adalah alokasi waktu jam pelajarannya. Alokasi waktu untuk program A4 terutama untuk kelas III lebih banyak dua jam pelajaran dibandingkan jam pelajaran untuk program A3. Hal ini

karena perbedaan alokasi jam pelajaran lainnya. Misalnya, siswa program A4 tidak mendapatkan pelajaran Ekonomi dan Matematika (untuk kelas III). Sehingga sisa alokasi jam pelajaran untuk siswa program A4 ditambah dua jam. Sebelum dilakukan analisa teks, peneliti melakukan analisis isi secara kuantitatif tema-tema dominan muncul dalam setiap kurikulum Sosiologi SMA dengan menggunakan unit analisis teks kurikulum Sosiologi SMA yang dikeluarkan oleh Depdikbud. Tema-tema dominan ini diambil dan dianalisa berdasarkan sub pokok bahasan yang tertuang dalam kurikulum yang dikeluarkan oleh Depdikbud dalam bentuk GBPP. Sesuai dengan hasil analisis yang menggambarkan gagasan sentral, maka dapat ditampilkan persentasenya sebagai berikut :

Tabel 3.7

Frekuensi Wacana Dominan dalam Kurikulum Sosiologi-Antropologi 1984

Periode	Tema-Tema Kekuasaan Negara	Frekuensi	Persentase
1984	1. Keteraturan sosial	36	69,2
	2. Hak Asasi Manusia (HAM)	3	5,8
	3. Persatuan dan Kesatuan	3	5,8
	4. Masyarakat Majemuk	3	5,8
	5. Kemajuan Material Pembangunan	4	7,6
	6. Modernisasi	3	5,8
	Jumlah	52	100

Frekuensi pada tabel diatas diambil dari tema per sub pokok bahasan. Cara ini diambil untuk melihat wacana dominan yang direpresentasikan melalui teks kurikulum. Dari tabel diatas, tampak wacana dominan yang muncul pada Kurikulum 1984 adalah materi keteraturan sosial (69,2 %) dan kemajuan material pembangunan (7,6 %). Untuk mengetahui bagaimana tema-tema kekuasaan negara muncul dalam teks akan ditetapkan. Untuk lebih menjelaskan konstruksi wacana dominan dalam Kurikulum Sosiologi-Antropologi 1984 berikut disajikan analisa dibawah ini :

1. Deskripsi (*Text Analysis*)

Kurikulum 1984 mengkonstruksikan keteraturan sosial sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional⁷. Pada konteks Orde Baru, terciptanya keteraturan sosial merepresentasikan tertanamnya ideologi pembangunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, stabilitas dan ketertiban. Tema keteraturan sosial menjadi isu yang sangat

⁷ Latif dan Ibrahim (1996). op.cit, hal.36

penting pasca ditetapkannya UU Politik yang mewajibkan seluruh organisasi sosial politik untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Adanya ketertiban dan juga stabilitas politik pada dasarnya merupakan tujuan utama Orde Baru, pasca Orde Lama tumbang⁸. Ketertiban hidup dapat dicapai dari mulai komunitas RT, RW, negara hingga hubungan antarnegara. Kuncinya terletak pada peran manusia sebagai makhluk sosial. Terdapat dua makna dalam hal tersebut. *Pertama*, individu harus sadar dengan status, peran dan identitas sosialnya. *Kedua*, interaksi sosial antarindividu dan adanya saling membutuhkan masing-masing individu akan melahirkan satu sistem sosial yang harmonis. Dengan demikian idiom ketertiban politik yang dikembangkan Orde Baru selalu mengedepankan adanya penyesuaian terhadap berbagai nilai, norma dan berbagai aturan lainnya.

Tabel 3.8

Konstruksi Wacana Dominan Kurikulum Sosiologi-Antropologi SMA 1984

Keteraturan sosial	Keteraturan sosial dalam <i>frame</i> ini dibangun dengan eksplanasi terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup manusia. Terpenuhinya kebutuhan hidup manusia menjadi bagian penting dalam terciptanya sistem sosial yang harmonis. Masyarakat yang teratur dan tertib adalah masyarakat yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya (primer, sosial dan integratif).
Hak Asasi Manusia	Hak asasi manusia merupakan hak dan kewajiban individu sebagai warga negara sesuai dengan status sosial dan peranannya. HAM juga dipahami lebih kepada individu memiliki patriotisme dalam melaksanakan tugasnya.
Persatuan dan Kesatuan	Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan wadah bagi keanekaragaman masyarakat.
Masyarakat Majemuk	Masyarakat Indonesia berbeda-beda berdasarkan suku bangsa dan golongan etnik ke dalam satu masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁸Kajian lebih mendalam tentang konsolidasi ekonomi-politik Orde Baru dilakukan Mas'ood, Mohtar (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (terjemahan: *The Indonesian Economy and Political Structure During The Early New Order, 1966-1971*). Jakarta;LP3ES, hal. 146.

Kemajuan Material Pembangunan	Pembangunan dianggap sebagai solusi dari berbagai masalah yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Modernisasi	Kemajuan itu juga ditandai dengan kekuatan modernisasi yang harus diterima oleh masyarakat kita. Modernisasi mensyaratkan kemajuan berbagai tatanan sosial ke arah modern yang lebih rasional, efisien. Berbagai tatanan sosial yang dianggap tradisional harus ditinggalkan karena dianggap menghambat terjadinya modernisasi.

Sumber: data primer (2008)

2. Interpretasi (*Processing Text*)

Pada tahun 1984 merupakan fase dimana pembangunan Indonesia mengalami masa kejayaan, ditandai dengan swasembada pangan. Teks ini mengokohkan keberhasilan pembangunan tersebut. Bahwa, pembangunan merupakan realisasi amanat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menyukseskan sekaligus menggalakkan program pembangunan. Beberapa langkah yang harus dilakukan setiap warga negara antara lain meningkatkan partisipasinya, menjauhkan diri dari berbagai hal yang dianggap menghambat jalannya pembangunan (boros, tidak berdisiplin, dan sebagainya). Hal yang menarik dalam ideologi pembangunan ini adalah semangat nasionalisme yang diusung Orde Baru. Secara lebih spesifik memang dijelaskan dalam wacana dominan Kurikulum 1984 yaitu Persatuan dan Kesatuan. Nasionalisme hanyalah bingkai dari Persatuan dan Kesatuan yang ditujukan kepada seluruh komponen bangsa dalam menegaskan berbagai cita-cita yang digariskan pemerintahan Orde Baru sejak awal kepemimpinannya. Semua praktek sosial harus berada dalam koridor nasionalisme. Di luar itu, berbagai *stereotype* diintrodusir--seperti 'tidak nasionalis', dan sebagainya-- kepada mereka yang dianggap berseberangan dengan negara.

3. Eksplanasi (*Social Analysis*)

Dengan demikian, dalam teks ini ingin menyampaikan pesan bahwa perubahan sosial jangan sampai melahirkan pola kehidupan sosial yang tidak serasi. Artinya,

perubahan harus diarahkan kepada kemajuan (*progress*). Perubahan yang terjadi jangan sampai melahirkan gejala yang dapat mengganggu keseimbangan sistem. Perubahan sosial yang baik dalam pandangan pemerintah adalah berbentuk pembangunan yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang didasarkan pada ideologi Pancasila. Dominasi modernisasi dalam konteks pembangunan Indonesia seolah menegaskan bahwa teori modernisasi klasik menjadi *mainstream* pembangunan Indonesia. Hadiz sebagaimana mengutip Huntington mengatakan :

“...pada akhir 1960-an (Huntington) telah mengisyaratkan suatu penekanan baru yang dengan efektif mendefinisikan modernitas berdasarkan pemeliharaan yang berhasil atas stabilitas politik. Para elit dan institusi-institusi negara, dengan demikian, semakin dijabarkan berdasarkan suatu kemampuan untuk mencegah revolusi---yang dianggap sinonim dengan kemerosotan ke dalam bentuk-bentuk anarki dan kekacauan”⁹

Secara lebih lengkap GBPP Sosiologi-Antropologi Kurikulum 1984 disajikan dibawah ini :

Tabel 3.9
GBPP Sosiologi-Antropologi Kurikulum 1984

Tujuan Kurikuler (1)	Tujuan Instruksional (2)	Pokok Bahasan (3)
Siswa memahami konsep-konsep mendasar mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial, hakikat masyarakat, dan hakikat kebudayaan, sehingga siswa dalam batas-batas tertentu setelah mengikuti mata pelajaran ini akan dapat mempunyai kemampuan untuk membuat generalisasi-generalisasi yang mendasar dan umum mengenai kenyataan sosial yang dihadapi, dan dapat mengembangkan sendiri kemampuan analisis secara lebih mendalam dalam salah satu bidang	1. Siswa dapat mengamati dan dapat mencari dasar penggolongan kebutuhan-kebutuhan manusia	1.1 Kebutuhan Hidup Manusia 1.1.2 Pengertian 1.1.3 Kebutuhan Hidup Mendasar/Primer 1.1.4 Kebutuhan Sosial 1.1.5 Kebutuhan Integratif
	2. Siswa dapat memahami dasar-dasar penggolongan dan membandingkan bidang ilmu pengetahuan social yang landasannya adalah masalah-masalah yang terwujud dari usaha-usaha pemenuhan kebutuhan manusia.	2.1 Bidang-Bidang IPS 2.1.1 Pengertian 2.1.2 Geografi Sosial 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Sosiologi 2.1.5 Antropologi 2.1.6 Ilmu Politik 2.1.7 Ilmu Komunikasi

⁹ Hadiz, R. Vedi (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto* (Terjemahan). Jakarta:LP3ES, hal. 173

	<p>3. Siswa memahami konsep-konsep dasar dalam metodologi ilmu-ilmu sosial dan menggunakannya untuk bisa memahami gejala-gejala sosial yang dihadapi</p>	<p>3.1 Konsep-konsep Mendasar dalam Metodologi IPS</p>
	<p>4. Siswa dapat memahami sehingga dapat menafsirkan (memberi arti) dan membandingkan konsep-konsep mendasar mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial</p>	<p>4.1 Manusia sebagai Makhluk Sosial 4.1.1 Pengertian 4.1.2 Identitas Sosial 4.1.3 Status (Kedudukan) Sosial 4.1.4 Peranan 4.1.5 Interaksi 4.1.6 Interaksi Sosial 4.1.7 Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik dan Keagamaan</p>
	<p>5. Siswa mengenal sehingga dapat menggolongkan serta menafsirkan (memberi arti) konsep-konsep mendasar mengenai realita kehidupan sosial manusia.</p>	<p>5.1 Realita kehidupan Sosial Manusia 5.1.1 Pengertian 5.1.2 Keluarga 5.1.3 Kekerabatan 5.1.4 Perkumpulan/Asosiasi 5.1.5 Ketetangaan 5.1.6 Pertamanan dan Persahabatan 5.1.7 Saingan dan Lawan/Musuh 5.1.8 Komuniti 5.1.9 Masyarakat 5.1.10 Suku Bangsa 5.1.11 Bangsa dan Negara 5.1.12 Badan Internasional</p>
	<p>6. Siswa memahami konsep-konsep mendasar mengenai kebudayaan dan kehidupan manusia melalui penafsiran.</p>	<p>6.1 Kebudayaan sebagai Pedoman Hidup 6.1.1 Pedoman Hidup dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar 6.1.2 Pedoman Hidup dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial 6.1.3 Pedoman Hidup dalam Memenuhi Kebutuhan Integratif</p>

	<p>7. Siswa dapat mengamati dan menafsirkan (menemukan pola) keluarga sebagai satuan sosial yang paling dasar.</p> <p>8. Siswa mampu mengamati mencari dasar penggolongan/membandingkan serta menafsirkan masyarakat sebagai satuan sosial yang lebih luas.</p> <p>9. Siswa mampu menggolongkan (membandingkan) mengamati (menyimak) dan menafsirkan (memberi arti) masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>10. Siswa mampu mengamati, menafsirkan dan menggolongkan individu dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat Negara, dan warga dunia untuk memahaminya.</p>	<p>7.1 Keluarga sebagai satuan Sosial yang Paling Dasar</p> <p>7.1.1 Pengertian</p> <p>7.1.2 Proses Pembentukan Keluarga</p> <p>7.1.3 Fungsi Keluarga</p> <p>7.1.4 Susunan Keluarga yang Umum Berlaku</p> <p>7.1.5 Keluarga sebagai Penghubung orang-orang sekerabat</p> <p>8.1 Masyarakat sebagai satuan Sosial yang lebih Luas</p> <p>8.1.1 Pengertian</p> <p>8.1.2 Masyarakat Pedesaan</p> <p>8.1.3 Masyarakat Perkotaan</p> <p>8.1.4 Komuniti</p> <p>9.1 Masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>9.1.1 Pengertian</p> <p>9.1.2 Sarana Pergaulan antara Suku bangsa yang Berbeda</p> <p>9.1.3 Usaha Mempersatukan Masyarakat yang Beraneka Ragam</p> <p>9.1.4 Perbedaan Sosial Stratifikasi dan Suku Bangsa yang terwujud dalam Masyarakat Indonesia</p> <p>10.1 Individu sebagai Warga Masyarakat, Warga Negara dan Warga Dunia</p> <p>10.1.1 Pengertian</p> <p>10.1.2 Hak dan Tanggung Jawab Individu sebagai Warga</p>
--	---	--

		Masyarakat. 10.1.3 Hak dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara
11. Siswa mampu mengamati, menggolongkan dan menafsirkan integrasi sosial dan integrasi kebudayaan untuk memahaminya.	11.1 Integrasi Sosial dan Integrasi Kebudayaan 11.1.1 Pengertian 11.1.2 Masyarakat dan Kebudayaan sebagai Sistem 11.1.3 Jiwa Kebudayaan 11.1.4 Pengertian Integrasi Sosial	
12. Siswa memahami perubahan sosial budaya dengan mengamati, mencari dasar penggolongan dan menafsirkan perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi.	12.1 Perubahan Sosial dan Kebudayaan 12.1.1 Pengertian 12.1.2 Kecenderungan dan kebudayaan untuk Bertahan dan untuk Berubah 12.1.3 Faktor-faktor Perubahan 12.1.4 Modernisasi	
13. Siswa mampu mengamati, menganalisa, menarik kesimpulan, menggeneralisasi, dan merencanakan penelitian sederhana mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan perencanaan	13.1 Perkembangan dan Perubahan Sosial 13.1.1 Pengertian 13.1.2 Permasalahan yang dihadapi Negara Berkembang 13.1.3 Perubahan Melalui Pembangunan Nasional 13.1.4 Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Berencana 13.1.5 Dampak Sampingan Pembangunan	

3.3 Penutup: Keteraturan Sosial sebagai Wacana Dominan dalam Kurikulum Sosiologi SMA

Dari keseluruhan teks yang telah dilakukan, maka peneliti dapat melihat bahwa keteraturan sosial menjadi wacana dominan sejak Kurikulum Sosiologi 1984 hingga Kurikulum 2006. Hal yang membedakan wacana keteraturan sosial pada Kurikulum Orde Baru dan pasca Orde Baru adalah keteraturan sosial digunakan sebagai legitimasi politik dalam diskursus pembangunan yang tengah digalakkan Orde Baru. Hal tersebut dijelaskan Schiller sebagaimana dikutip Mas' oed:

“suharto menggambarkan stabilitas, ketertiban dan keamanan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu membuat kita semua merasa aman secara fisik dan damai di hati, bebas dari ketakutan akan ancaman-ancaman dari luar dan bebas dari ketakutan terhadap gangguan dari dalam’. Salah satu tujuan Orde Baru yang paling penting, katanya, adalah membangun suatu masyarakat baru yang merasa aman, menikmati arti penting ketertiban, (dan) mengejar kemajuan dalam suasana kestabilan...”¹⁰

Wacana keteraturan sosial yang termuat dalam kurikulum Sosiologi SMA pasca Orde Baru (Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006) tidak lagi dalam konteks diskursus pembangunan sebagai direpresentasikan dalam dua kurikulum era Orde Baru. Wacana keteraturan sosial pasca Orde Baru lebih kepada menciptakan keharmonisan masyarakat yang terus berubah dan dihadapkan pada berbagai isu kontemporer: globalisasi, *good governance*, otonomi daerah dan desentralisasi serta masyarakat sosial kultural. Sama halnya dengan wacana keteraturan sosial, wacana modernisasi juga menjadi *mainstream* pada Kurikulum 1984 dan 1994. Modernisasi meresap ke dalam paradigma pembangunan dan alam sadar masyarakat Indonesia termasuk ranah politik. Secara sederhana hasil analisis teks ini dapat disusun dalam bentuk matriks berikut ini :

¹⁰ Mas' oed, op.cit, hal. 147

Tabel 3.10
Wacana Dominan dalam Kurikulum Sosiologi SMA
(Kurikulum 1984 dan 2006)

Wacana Dominan	Kurikulum Sosiologi	
	1984	2006
1. Keteraturan sosial	X	X
2. Masyarakat Multikultural		X
3. Modernisasi	X	
4. Keterampilan Sosiologi		X
5. Perubahan Sosial		X
6. Hak Asasi Manusia (HAM)	X	
7. Persatuan dan Kesatuan	X	
8. Kemajuan Material Pembangunan	X	

